



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

L K I P

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 0532 ☎ 21034 📠 22011  
PANGKALAN BUN

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk tahun 2018 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sedangkan maksud dari penyusunan LKIP ini adalah untuk memperoleh tingkat pencapaian kinerja tugas pokok dan fungsi dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada akhirnya merupakan alat pengendali bagi pengambilan kebijakan dalam peningkatan kinerja.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian laporan ini, kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya, untuk itu saran dan kritik serta masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan akuratnya laporan ini sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu memberikan bimbingan, taufiq dan hidayah-Nya serta perlindungan kepada kita semua, sehingga tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak kita selalu dapat kita laksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Pangkalan Bun, 11 Februari 2019  
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680609 199503 1 003

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur teknis di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi yang tepat dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat pula, telah mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Adapun penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai rencana kinerja Tahun 2018 dan perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten
2. Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten
3. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman
4. Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi
6. Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
7. Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan upaya pengamanan pantai
8. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

Capaian kinerja dari sasaran tersebut diatas diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui dukungan pelaksanaan 18 (delapan belas) program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan. Secara umum disampaikan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 150,78% (sangat berhasil) dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 235.571.697.388,12 atau 98,70% sedangkan realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 adalah 99,87%.

## **I.1. DATA UMUM ORGANISASI**

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

### **A. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis yang berkedudukan di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi.**

Sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 48 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok :**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## 2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pembinaan dan penyusunan program dan kegiatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **I.2. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI**

Lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap organisasi Dinas terdiri dari aspek kekuatan (*strength*), aspek kelemahan (*weakness*), aspek peluang (*opportunities*) dan aspek hambatan (*threats*) atau melalui *SWOT* analisis.

Beberapa faktor kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa aspek kekuatan dan kelemahan merupakan potensi yang terkandung dalam tubuh organisasi. Kekuatan merupakan suatu keunggulan kompetitif dan komperatif yang dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan kelemahan harus dimobilisasi dan dioptimalkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat dikendalikan.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

### a. Kekuatan.

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu ketersediaan alat berat dan alat-alat laboratorium.
2. Adanya upaya pengendalian banjir.

### b. Kelemahan.

1. Kualitas dan kinerja aparatur Dinas dianggap masih kurang disiplin
2. Penerapan sistem informasi dan teknologi yang belum maksimal
3. Konektivitas antar wilayah di kabupaten masih perlu dibenahi
4. Kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan di kabupaten
5. Estetika infrastruktur perkotaan
6. Ketersediaan sanitasi permukiman dan air bersih perdesaan
7. Ketersediaan dokumen penataan ruang
8. Pengelolaan dan pengembangan irigasi
9. Ketersediaan sumber air baku
10. Pembinaan jasa konstruksi daerah

Aspek peluang dan hambatan adalah merupakan faktor yang menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan pengendali pembangunan.

a. Peluang tersebut adalah :

- Tingkat kepatuhan terhadap tata ruang
- Pengembangan infrastruktur merupakan arah kebijakan nasional

b. Hambatan adalah :

- Kondisi alam (cuaca/iklim)
- Kuantitas & Kualitas Sumber Daya Manusia pada Badan Usaha Jasa Konstruksi

### **I.3. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
3. Bidang terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
    - 1) Kepala Seksi Irigasi dan Rawa;
    - 2) Kepala Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Jaringan SDA;
    - 3) Kepala Seksi Sungai dan Pantai.
  - b. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    - 1) Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
    - 2) Kepala Seksi Jalan;
    - 3) Kepala Seksi Jembatan.
  - c. Kepala Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
    - 1) Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya;
    - 2) Kepala Seksi Tata Bangunan & Lingkungan Permukiman;
    - 3) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum.
  - d. Kepala Bidang Penataan Ruang:
    - 1) Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang;
    - 2) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang;
    - 3) Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
  - e. Kepala Bidang Bina Konstruksi:
    - 1) Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
    - 2) Kepala Seksi Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;
    - 3) Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Alat Berat
- b. Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi.

Untuk aspek kepegawaian, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 bahwa sampai dengan akhir Desember 2018 jumlah pegawai organik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Aspek Kepegawaian Dinas PUPR Tahun 2018**

No.	Golongan	Per 31 Desember 2018
1.	Golongan I/a	-
	Golongan I/b	-
	Golongan I/c	-
	Golongan I/d	2
	Jumlah Golongan I	2
2.	Golongan II/a	-
	Golongan II/b	2
	Golongan II/c	9
	Golongan II/d	12
	Jumlah Golongan II	23
3.	Golongan III/a	7
	Golongan III/b	18
	Golongan III/c	7
	Golongan III/d	11
	Jumlah Golongan III	43
4.	Golongan IV/a	5
	Golongan IV/b	2
	Golongan IV/c	-
	Golongan IV/d	-
	Golongan IV/e	-
	Jumlah Golongan IV	7
<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>75</b>

Tingkat pendidikan pegawai organik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas adalah sebagai berikut :

a. Berijazah SD	:	1	orang
b. Berijazah SLTP	:	1	orang
c. Berijazah SLTA	:	29	orang
d. Berijazah Sarjana Muda/D3	:	5	orang
e. Berijazah Sarjana (S1)/D4	:	25	orang
f. Berijazah Sarjana (S2)	:	12	orang
g. Berijazah Sarjana (S3)	:	2	orang
<b>Jumlah</b>	:	<b>75</b>	<b>orang</b>

#### **I.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1. Data Umum Organisasi
- I.2. Aspek Strategis Organisasi
- I.3. Struktur Organisasi
- I.4. Sistematika Penyajian

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- II.1. Rencana Strategis
- II.2. Perjanjian Kinerja

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- III.1. Capaian Kinerja Organisasi
- III.2. Realisasi Anggaran

##### **BAB IV PENUTUP**

## **II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2018 – 2022 yang merupakan dokumen perencanaan strategis sebagai tolak ukur pelaksanaan APBD.

Perencanaan strategis (Renstra) juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan dinas berdasarkan tolok ukur kinerja yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai amanat masyarakat di era reformasi, maka Renstra yang disusun oleh dinas ini harus dapat menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa Renstra ini harus dapat menggambarkan keutuhan tanggung jawab Dinas dalam implementasinya berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi dari seluruh sumber daya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh sebab itu, maka pelaksanaan Renstra dinas ini harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **II.1.1 VISI DAN MISI**

Sebagaimana diketahui bahwa visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**. Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga

3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Relevansi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap visi dan misi tersebut di atas adalah pada **misi ketiga yaitu mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup**. Selama lima tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Percepatan pembangunan infrastruktur ke depan akan diarahkan sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu desa menuju kota dan meningkatkan kualitas jalan antar desa dan desa ke kecamatan;
2. Peningkatan kualitas jalan-jalan strategis dan penghubung untuk lintas ekonomi guna pemenuhan sembilan bahan pokok dan secara khusus jalan pertanian untuk memudahkan perdagangan hasil bumi dan pertanian;
3. Pembangunan jalan lingkar luar kabupaten;
4. Penuntasan pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama;
5. Pembukaan jalan kecamatan arut utara ke kabupaten;
6. Pembangunan jembatan penghubung antar desa dengan kecamatan yang melalui sungai;
7. Pemetaan jalan umum dan lingkungan serta peningkatan kelas jalan;
8. Pembangunan Water Front City;
9. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek untuk efisiensi dan menekan kebocoran anggaran;
10. Pelaksanaan pembangunan dengan prioritas, merata, seimbang dan tepat guna;
11. Rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan yang tidak sesuai peruntukannya;
12. Perawatan infrastruktur secara berkala dan cepat tepat penanganannya;
13. Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan canggih;
14. Melanjutkan dan meningkatkan saluran irigasi serta normalisasi saluran;
15. Penyiapan konservasi air dan penyediaan air baku;
16. Pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yg komprehensif untukantisipasi banjir dan kekeringan.

## **II.1.2 TUJUAN**

Pembangunan bidang sarana dan prasarana diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar agar dapat menjamin keberlangsungan fungsi masyarakat atau rumah tangga, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, memperkecil kesenjangan, dan mewujudkan keadilan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dalam pelaksanaan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan pembinaan jasa konstruksi daerah;
3. Meningkatkan kualitas layanan kota-desa;
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat;
5. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan;
6. Meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air baku
7. Mengendalikan banjir pada daerah genangan air dan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi;
8. Menyediakan informasi tata ruang.

## **II.1.3 SASARAN**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dalam pelaksanaan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja aparatur
2. Meningkatnya informasi jasa konstruksi dilakukan secara aktif dan berkala melalui SIPJAKI
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten
4. Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten
5. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman
6. Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi
8. Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
9. Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan upaya pengamanan pantai
10. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

## **II.1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. Adapun IKU yang telah ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu tahun 2018 – 2022 terdiri dari :

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang;
  2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (Konektivitas) di kabupaten;
  3. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman;
  4. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
  5. Presentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (>30 cm selama 2 jam, >2 kali setahun
  6. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan;
  7. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangan;
  8. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
  9. Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir;
  10. Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai;
  11. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang kabupaten/kota.
- Adapun target dari setiap IKU tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

#### II.1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun anggaran 2018 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: 900/04/II/DPPA-SKPD/2018 tanggal 18 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2018**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	526.004.866,00
		- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	47.297.250,00
		- Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.318.436.600,00
		- Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.290.350,00
		- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	31.250.000,00
		- Penyediaan alat tulis kantor	183.388.400,00
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	63.822.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
		- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.408.000,00
		- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	448.472.080,00
		- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	707.900.000,00
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	49.410.000,00
		- Pengadaan Mebeleur	47.755.000,00
		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	76.000.000,00
		- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000,00
		- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	401.347.000,00
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan mesin/kartu absensi	12.000.000,00
		- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	96.376.500,00
		- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	101.750.000,00
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	228.000.000,00
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.460.000,00
		- Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.460.000,00
		- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.460.000,00
6.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Pembangunan jalan	11.817.266.000,00
		- Pembangunan jembatan	14.467.090.000,00
		- Peningkatan jalan	104.108.596.750,00
7.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	- Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong	8.595.354.119,00
8.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	6.620.352.000,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	629.693.000,00
9.	Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	- Penyusunan sistem informasi/data base jalan	98.460.000,00
		- Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	97.800.000,00
10.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	- Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	409.137.000,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	933.160.000,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	23.203.000,00
11.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	- Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	220.000.000,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	3.996.165.000,00
		- Pembangunan jaringan irigasi	2.371.362.000,00
		- Peningkatan jaringan irigasi	8.365.753.600,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
12.	Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	- Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	4.669.724.200,00
13.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	11.097.405.006,00
		- Pengembangan distribusi air minum	1.370.033.475,00
14.	Pengendalian Banjir	- Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	3.737.369.000,00
		- Pembangunan prasarana pengaman pantai	1.687.400.000,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	5.654.211.600,00
15.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	- Perencanaan pengembangan infrastruktur	543.000.000,00
		- Pembangunan/peningkatan infrastruktur	11.008.427.000,00
16.	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	906.684.000,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan permukiman	2.238.694.400,00
		- Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan permukiman	26.814.813.304,00
17.	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	- Survey dan pemetaan	545.649.800,00
		- Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang	110.125.000,00
		- Pengawasan pemanfaatan ruang	147.467.200,00
18.	Pembinaan Konstruksi	- Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	469.228.500,00
		- Penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi	326.942.000,00
		- Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	231.995.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>238.672.850.000,00</b>

## II.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana yang termuat dalam lampiran 1.

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi diperoleh berdasarkan pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran dengan memperhatikan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada rencana strategis (RENSTRA). Untuk menentukan capaian kinerja sasaran digunakan pengukuran melalui skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal**

Urutan	Skala Pengukuran Ordinal	Kategori
I	$X > 100\%$	Sangat Berhasil
II	$91\% < X \leq 100\%$	Berhasil
III	$81\% < X \leq 90\%$	Cukup Berhasil
IV	$X \leq 81\%$	Kurang Berhasil

Berikut ini adalah pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018:

**Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	78,34%	78,52%	100,23
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	83,10%	100%	120,34
3.	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	79%	67,5%	85,44
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	90%	87,6%	97,33
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	77%	83,5%	108,44
4.	Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan	76,90%	61,8%	80,36
5.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangan	33%	76%	230,30
6.	Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	19%	68,73%	361,74
7.	Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan upaya pengamanan pantai	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	16%	43,33%	270,81
		Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai	45%	46,60%	103,56
8.	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang kabupaten/kota	16,67%	16,67%	100
<b>8 Sasaran</b>		<b>11 IKU</b>			<b>150,78</b>

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 diukur dari 11 indikator kinerja untuk mencapai 8 sasaran dengan rata-rata

capaian sasaran sebesar 150,78% (sangat berhasil). Adapun rincian capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten**

Sasaran	IKU	Target 2018	Realisasi 2019	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	78,34%	78,52%	100,23

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten pada tahun 2018 diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang 78,52%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai dengan baik di tahun 2018. Keberhasilan capaian kinerja ini selain didukung oleh pengalokasian anggaran sesuai perencanaan penanganan juga didukung oleh pengawasan penggunaan kelas jalan sesuai fungsinya karena beban kendaraan juga mempengaruhi kualitas konstruksi jalan tersebut.

Pencapaian sasaran tersebut didukung melalui pelaksanaan program dan kegiatan berikut:

❖ Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Maksud dari program ini melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dengan pemeliharaan tiap tahunnya. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.250.045.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 7.134.494.800,- (98,41%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

1. *Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan*

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan jalan dengan perkerasan hotmix, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sebelumnya telah beraspal sehingga mengembalikan kondisi jalan dalam keadaan baik. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 6.620.352.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 6.511.160.800,- (98,35%). Target kegiatan ini pada tahun 2018 yaitu melakukan rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 200 Km dan terealisasi 163,29 Km atau 81,64 % serta perencanaan dan pengawasan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen.

2. *Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan*

Kegiatan ini dilakukan untuk pemeliharaan jembatan yang telah dibangun sebagai penghubung kecamatan dengan kecamatan dan desa dengan desa. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 629.693.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 623.334.000,- (98,99%). Pada akhir tahun 2018 jumlah jembatan yang telah di rehabilitasi sebanyak 15 unit dari target 12 unit jembatan atau terealisasi 125 % serta perencanaan dan pengawasan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen.



*Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan*



*Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan*

## **Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten**

<b>Sasaran</b>	<b>IKU</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	83,10%	100%	120,34

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran meningkatnya konektivitas wilayah di kabupatentahun 2018 diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di kabupaten diperoleh capaian sasaran sebesar 120,34% Hal tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. Sampai dengan akhir tahn 2018, seluruh kecamatan dan desa telah terhubung sehingga pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di kabupaten juga telah terhubung.

Pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut :

### ❖ Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Maksud dari program ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan pembangunan jalan, peningkatan jalan dan pembangunan jembatan serta sarana dan prasarana penunjang jalan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan dan jembatan serta prasarana penunjang jalan dalam kondisi baik. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 130.392.952.750,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 128.769.668.905,31 (98,76%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

#### 1. Pembangunan Jalan

Kegiatan pembangunan jalan dilaksanakan untuk membangun jalan dengan perkerasan hotmix maupun pembukaan jalan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sebelumnya belum beraspal sehingga berdampak kepada aktifitas masyarakat. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 11.817.266.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 11.809.351.844,- (99,93%). Target kinerja kegiatan ini pada tahun 2018 yaitu

pembangunan jalan sepanjang 5 Km dan terealisasi 5,47 Km atau 109,4% serta perencanaan dan pengawasan target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen.

### *2. Peningkatan Jalan*

Kegiatan peningkatan jalan dilaksanakan untuk meningkatkan kondisi jalan dengan perkerasan hotmix, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sebelumnya belum mantap menjadi mantap, baik dengan perkerasan kaku, perkerasan lentur maupun kombinasi keduanya. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 104.108.596.750,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 102.497.157.061,31 (98,45%). Target kinerja kegiatan ini pada tahun 2018 yang didanai melalui APBD yaitu peningkatan jalan kabupaten sepanjang 15 Km dan terealisasi 15,36 Km atau 102,4% serta perencanaan dan pengawasan target 26 Dokumen terealisasi 26 Dokumen. Sedangkan target kinerja kegiatan ini yang didanai melalui DAK yaitu peningkatan jalan kabupaten sepanjang 13,41 km dan terealisasi 14,20 Km atau 105,9%.

### *3. Pembangunan Jembatan*

Kegiatan ini dilakukan untuk membangun jembatan yang bertujuan memberi akses atau menghubungkan kecamatan dengan kecamatan dan desa dengan desa. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 14.467.090.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 14.463.160.000,- (99,97%). Pada akhir tahun 2018 telah terbangun sebanyak 13 Unit Jembatan dari target 13 Unit atau terealisasi 100% serta pengawasan 3 dokumen terealisasi 3 dokumen.



*Pembangunan Jalan*



*Pembangunan Jembatan*



*Peningkatan Jalan*

❖ Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Maksud dari program ini adalah untuk melaksanakan penyusunan data base jalan dan jembatan guna mendapatkan kondisi jalan dan jembatan terakhir. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 196.260.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 196.260.000,- (100%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

1. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

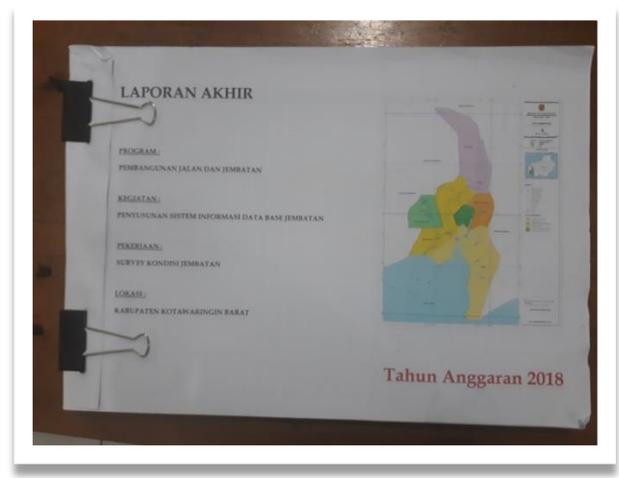
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan update informasi mengenai kondisi jalan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 98.460.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 98.460.000,- (100%). Target kegiatan ini pada tahun 2018 yaitu 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100% dengan data jalan kabupaten kondisi baik 609,21Km, sedang 350,967Km, rusak ringan 141,559 Km dan rusak berat 224,881 Km. Adapun panjang jalan kabupaten secara keseluruhan adalah 1.222,845 Km.

2. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan melakukan update informasi mengenai kondisi jembatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 97.800.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 97.800.000,- (100%). Target kegiatan ini pada tahun 2018 yaitu 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100 % dengan data jembatan kondisi baik 212 unit, sedang 14 unit, rusak ringan 15 unit dan rusak berat 16 unit.



Data Base Jalan



Data Base Jembatan

**Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman**

Sasaran	IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	79%	67,5%	85,44
	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	90%	87,6%	97,33
	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	77%	83,5%	108,44
Jumlah capaian rata-rata				97,07

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman pada tahun 2018 diukur dari 3 indikator kinerja yaitu persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman diperoleh capaian kinerja sebesar 85,44%, persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai diperoleh capaian kinerja sebesar 97,33% dan persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, >2 kali setahun) diperoleh capaian kinerja sebesar 108,44%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman adalah 97,07%.

Pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut :

❖ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Maksud dari program ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.467.438.481,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 12.096.883.546,- (97,03%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

*1. Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum*

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan jumlah akses air minum yang aman bagi masyarakat. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.370.033.475,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 1.366.824.200,- (99,77%). Hingga tahun 2018 capaian akses air minum sebesar 67,5% dari target 79%. Yang menjadi kendala dalam upaya pencapaian target pemenuhan akses air minum di Kabupaten Kotawaringin Barat salah satunya adalah perluasan penyebaran permukiman lebih besar dibanding perluasan pengembangan dan jaringan air minum yang dibangun. Pembangunan sistem pengolahan air minum dan jaringannya ini tentunya sangat membutuhkan anggaran yang sangat besar, dimana selama ini dalam pelaksanaannya sangat bergantung dari sumber Dana Alokasi Khusus.

*2. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah*

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan air limbah terutama permasalahan air limbah domestik. Sarana air limbah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi cubluk/jamban tidak aman sebagai akses dasar, jamban dengan tanki septik aman dan MCK Komunal (SPALD setempat) serta IPAL Komunal (SPALD terpusat). Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 11.097.405.006,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 10.730.059.346,- (96,69%). Cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik, hingga akhir tahun 2018 cakupan akses air limbah domestik sudah mencapai 87,6% atau 97,6% dari target 90 % dan capaian 47 desa/kelurahan yang sudah ODF (*Open Defecation Free*). Kendala yang dihadapi dalam penanganan air limbah domestik ini adalah masih sulitnya menghilangkan praktek BABS (pembuangan langsung) sebesar 12,4% oleh masyarakat terutama di daerah bantaran sungai dikarenakan ketersediaan lahan yang sangat terbatas dalam upaya penyediaan sarana air limbah. Permukiman yang padat dan teknologi pengelolaan sistem air limbah yang tepat guna juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya. Untuk pelayanan pengelolaan air limbah kedepannya akan

semakin ditingkatkan dengan memaksimalkan fungsi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) dengan melaksanakan program Penyedotan Lumpur Tinja Terjadual (PLTT) pada infrastruktur yang sudah dibangun baik SPALD Setempat maupun SPALD Terpusat.

❖ Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Maksud dari program ini adalah melaksanakan pembangunan drainase/gorong-gorong disisi kanan kiri jalan dan juga permukiman sebagai saluran air saat terjadi hujan. Tujuan dari program ini meningkatkan kualitas saluran drainase agar tidak terjadi genangan air pada jalan dan permukiman, terutama pada daerah-daerah rawan genangan air. Sistem drainase yang telah ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar berada di daerah perkotaan yang ada di sepanjang jaringan jalan dan permukiman, namun semakin bertambahnya penduduk kepadatanpun semakin bertambah yang mengakibatkan daerah resapan dan aliran air menjadi terganggu dikarenakan berubah fungsi menjadi perumahan dan permukiman, sehingga berpotensi timbulnya titik genangan baru. Beberapa daerah cekungan juga merupakan kendala di dalam mengatasi aliran air sehingga masih ada daerah-daerah yang tergenang air atau banjir sesaat pada waktu turun hujan deras.

Secara umum layanan drainase di kabupaten kotawaringin barat masih relatif lambat dalam mengurangi genangan. Ini dikarenakan pada titik-titik genangan tersebut harus melakukan penanganan yang secara teknis lebih rumit, dan membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2018 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.595.354.119,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 8.548.368.591,68,- (99,45%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu *Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong* dengan realisasi drainase yang dibangun sepanjang 9,40 Km atau 104 % dari target 9,05 Km.



*Pembangunan saluran drainase/  
gorong-gorong*



*Penyediaan Prasarana dan Sarana Air  
Limbah (IPAL Di Kel.Raja Seberang)*

#### Sasaran 4 : Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan

Sasaran	IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan	Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di perkotaan	76,90%	61,8%	80,36

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan pada tahun 2018 diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di perkotaan, diperoleh capaian sasaran sebesar 80,36%. Dari nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat target kinerja yang belum tercapai dengan baik ditahun 2018, namun demikian target ini akan terus ditingkatkan pencapaiannya dengan mengarahkan pembangunan yang akan mendukung sasaran berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan.

Pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut :

❖ Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Maksud dari program ini adalah melaksanakan pembangunan dengan salah satu tujuan mengurangi kawasan kumuh perkotaan baik melalui rehabilitasi/pemeliharaan maupun pembangunan baru. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.551.427.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 11.510.858.434,32 (99,65%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 543.000.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 518.649.000,- (95,52%).

2. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Insfrastruktur

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 11.008.427.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 10.992.209.434,32 (99,85%). Salah satu penanganan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 pada lokasi kawasan kumuh diantaranya pembangunan Water Front City di Kelurahan Mendawai dan pekerjaan penimbunan jalan di mendawai seberang dan raja seberang. Selain kegiatan yang menggunakan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat Pula Penanganan Kawasan Kumuh di daerah tersebut melalui Anggaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 dengan melaksanakan perbaikan jalan melalui proteksi dan timbunan di Mendawai Seberang. Secara umum penangan kawasan kumuh didaerah perkotaan mengalami pengurangan 8,2Ha atau 3,2% dari Kawasan kumuh perkotaan.



*Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur  
(Water Front City)*

❖ Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Maksud dari program ini adalah pembangunan fisik untuk kesejahteraan dan keselamatan umum yang meliputi ketersediaan jalan, air bersih, sanitasi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 29.960.191.704,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 29.732.982.990,20 (99,24%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

*1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan*

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan penyediaan air bersih bagi masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit khususnya yang berhubungan dengan air dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 906.684.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 902.281.000,- (99,51%). Pada tahun 2018 sudah dilaksanakan penanganan pipa dengan panjang total 2.657 meter dan sambungan rumah 190 meter. Selain itu juga telah dilaksanakan pekerjaan optimalisasi SPAM perdesaan di desa Sakabulin, Desa Sungai Rangit Jaya, Desa Sungai Karang Sari, Desa Teluk Pulau, dan Desa Sungai Cabang.

*2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman*

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kondisi pelayanan infrastruktur jalan/jembatan untuk tetap pada kondisi baik sehingga umur ekonomis jalan dan jembatan yang telah terbangun dapat tercapai secara maksimal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pemeliharaan baik berupa pemeliharaan rutin maupun kegiatan pemeliharaan berkala infrastruktur jalan dan jembatan yang ada. Kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan baik berupa penanganan pemeliharaan rutin jalan maupun pemeliharaan berkala jalan dan jembatan merupakan kegiatan yang terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan capaian pembangunan jalan yang telah dilaksanakan. Kegiatan pemeliharaan ini ditujukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat berakibat pada tingginya biaya penanganan. Jenis penanganan

adalah rehabilitasi titian kayu ulin, cor beton, dan sand sheet. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.238.694.400,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 2.236.194.300,- (99,89%). Cakupan wilayah kegiatan ini adalah Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. Panjang total penanganan 4.576 meter dan jumlah jembatan yang direhabilitasi sebanyak 3 buah.

### 3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

Dalam upaya peningkatan sarana transportasi jalan lingkungan permukiman di kabupaten kotawaringin Barat maka sarana jalan lingkungan permukiman harus di tingkatkan dan dipelihara guna kenyamanan penggunaannya. Mengingat pentingnya jalan lingkungan permukiman sebagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan masyarakat umum pengguna jalan terutama jalan lingkungan permukiman, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat secara terus menerus berupaya untuk menambah dan meningkatkan kondisi jalan lingkungan permukiman, baik itu berupa pembangunan jalan maupun peningkatan jalan. Jenis konstruksi yang digunakan adalah jalan cor beton, laston, titian kayu ulin, HRS-Base, burda, telford, sand sheet, dan timbunan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 26.814.813.304,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 26.594.507.690,20 (99,18%). Cakupan wilayah kegiatan ini adalah Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Kotawaringin Lama. Panjang total penanganan 23.755 meter.



*Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman*

### Sasaran 5 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi

Sasaran	IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangan	33%	76%	230,30

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi pada tahun 2018 diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan

kewenangan diperoleh capaian sasaran sebesar 230,30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana irigasi yang mendukung pertanian sudah cukup memadai, namun perlu terus dilakukan peningkatan dan pemeliharaan guna menjaga dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi pada tahun-tahun selanjutnya.

Pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut :

- ❖ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Maksud dari program ini adalah penataan, pengaturan, pembuatan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air pada daerah irigasi dan daerah rawa bertujuan dalam penyediaan infrastruktur untuk mendukung pertanian agar terpenuhinya kebutuhan air pertanian, mengurangi kehilangan air, menambah debit air, tersedianya jalan inspeksi saluran di kawasan daerah irigasi/rawa. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.953.280.600,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 14.948.119.900,- (99,97%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu:

#### *1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi*

Kegiatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan dalam rangka menyusun perencanaan dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan sehingga mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup masyarakat. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 220.000.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 217.250.000,- (98,75%). Target yang direncanakan tahun 2018 yaitu Review Design Jaringan Irigasi/Rawa 1 kawasan/dokumen dan terealisasi sesuai target yaitu 1 kawasan/dokumen atau 100 %.

#### *2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi*

Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi bertujuan untuk memelihara jaringan irigasi yang telah dibangun dalam upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.996.165.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 3.995.546.000,- (99,98%). Kegiatan ini meliputi pemeliharaan jaringan irigasi/rawa dan rehabilitasi jaringan irigasi/rawa, yaitu :

- Rehabilitasi jaringan daerah irigasi kewenangan kabupaten dengan target panjang 5.000 meter dan terealisasi panjang 3.922 meter atau terealisasi 78,43% (1 daerah irigasi);
- Pemeliharaan jaringan daerah irigasi kewenangan kabupaten dengan target panjang 10.000 meter dan terealisasi panjang 14.100 meter atau terealisasi 141 % (2 daerah irigasi);
- Rehabilitasi jaringan daerah irigasi rawa yang dengan target panjang 20.000 meter dan terealisasi panjang 18.597 atau terealisasi 92,98 % (2 daerah irigasi rawa);
- Pemeliharaan jaringan daerah irigasi rawa dengan target panjang 180.000 meter dan terealisasi panjang 146.914 meter atau terealisasi 81,62 % (16 daerah irigasi rawa).

#### *3. Pembangunan Jaringan Irigasi*

Kegiatan pembangunan jaringan irigasi bertujuan untuk menunjang sarana dan prasarana infrastruktur di kawasan pertanian baik dalam memenuhi kebutuhan air pertanian, menambah debit air dan memudahkan akses ke lahan pertanian. Alokasi anggaran

kegiatan ini sebesar Rp. 2.371.362.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 2.370.841.000,- (99,98%). Pembangunan jaringan irigasi pada tahun 2018 meliputi pembangunan saluran irigasi dan jembatan layan. Target kegiatan terealisasi, yaitu :

- Jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dibangun adalah 2 daerah irigasi (DI) dan terealisasi 2 daerah irigasi (DI) yaitu DI Pangkalan Satu dan DI Berambai Makmur atau teralisasi 100 %.
- Jaringan Reklamasi Rawa yang menjadi kewenangan kabupaten yang dibangun adalah 9 daerah irigasi rawa (DIR) dan terealisasi 9 daerah irigasi rawa (DIR) yaitu DIR Natai Baru, DIR Purbasari, DIR Mendawai , DIR Mendawai Seberang, DIR Raja Seberang, DIR Kotawaringin Hulu, DIR Sei Tendang, DIR Sei Kapitan, dan DIR Kubu atau terealisasi 100%.

#### *4. Peningkatan Jaringan Irigasi*

Kegiatan peningkatan jaringan irigasi bertujuan untuk meningkatkan fungsi kinerja jaringan irigasi dalam pelayanan memenuhi kebutuhan air pertanian dan mobilitas ke lahan pertanian guna menambah/meningkatkan lahan dan hasil pertanian. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 8.365.753.600,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 8.364.482.900,- (99,98%). Peningkatan jaringan irigasi pada tahun 2018 meliputi peningkatan jalan inspeksi, peningkatan saluran dan peningkatan bangunan air dan embung. Target kegiatan terealisasi, yaitu :

- Jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ditingkatkan adalah 2 daerah irigasi (DI) dan terealisasi 2 daerah irigasi (DI) yaitu DI Pangkalan Satu dan DI Berambai Makmur atau 100 %.
- Jaringan reklamasi rawa yang menjadi kewenangan kabupaten yang ditingkatkan adalah 5 daerah irigasi rawa (DIR) dan terealisasi 5 daerah irigasi rawa (DIR) yaitu DIR Natai Baru, DIR Mendawai Seberang, DIR Marga Mulya, DIR Natai Kerbau dan DIR Sabuai atau terealisasi 100%.



*Peningkatan Jaringan Irigasi  
(Pembuatan jalan inspeksi)*



*Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi*

## Sasaran 6 : Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Sasaran	IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	19 %	68,73 %	361,74

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahun 2018 diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diperoleh capaian kinerja sebesar 361,74%. Dari nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dengan baik ditahun 2018, namun demikian target ini akan terus ditingkatkan pencapaiannya dengan memenuhi kebutuhan air baku untuk masyarakat.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah:

- ❖ Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Maksud dari program ini adalah untuk menjaga ketersediaan air baku guna mencukupi kebutuhan air sehari-hari bagi masyarakat dan sebagai konservasi air. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.669.724.200,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 4.571.964.422,01 (97,91%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya.

Pembangunan pada kegiatan tersebut meliputi pembangunan embung dan revitalisasi danau dengan target sebanyak 13 buah dan terealisasi sebanyak 13 buah yaitu 12 pembangunan embung berada di Desa Umpang, Desa Sungai Kuning, Desa Sido Mulyo, Desa Kebun Agung, Desa Arga Mulya, Desa Karang Sari, Desa Amin Jaya, Desa Pangkalan Dewa, Desa Sungai Rangit Jaya, Desa Lada Mandala Jaya, Desa Riam Durian, Desa Sungai Tendang dan 1 buah Revitalisasi Danau Masorayan atau terealisasi 100%.



*Pembangunan Embung*

**Sasaran 7 : Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan upaya pengamanan pantai**

Sasaran	IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak airdan upaya pengamanan pantai	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	16 %	43,33%	270,81
	Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai	45%	46,60%	103,56
Jumlah capaian rata-rata				187,18

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak airdan upaya pengamanan pantaipada tahun 2018 diukur dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase berkurangnya kawasan rawan banjir dengan capaian kinerja 270,81% dan dari indikator persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai diperoleh capaian kinerja sebesar 103,56%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik.

Pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut :

❖ Program Pengendalian Banjir

Program ini bertujuan mengelola sumber daya air terhadap daya rusak air dalam upaya untuk pengendalian banjir dilaksanakan dalam kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, normalisasi/pemeliharaan saluran sungai dan pengamanan garis pantai terhadap abrasi dan erosi. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.078.980.600,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 11.074.990.400,- (99,96%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

*1. Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan – Badan Sungai*

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembangunan/peningkatan saluran induk pengendali banjir dengan pasangan batu/cor beton, rehabilitasi serta pemeliharaan rutin saluran induk pengendali banjir kawasan perkotaan, bertujuan untuk mengurangi titik-titik daerah banjir baik dari hujan lokal maupun sungai yang melintas di dalam kota. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.737.369.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 3.734.639.400,- (99,93%). Target kegiatan terealisasi, yaitu :

- Pembangunan/peningkatan kanal/saluran induk pengendali banjir sepanjang 1.615 meter dan terealisasi sepanjang 1.097,3 meter atau terealisasi 67,94%;
- Rehabilitasi kanal/saluran induk pengendali banjir sepanjang 8.832 meter dan terealisasi sepanjang 7.330 meter atau terealisasi 82,99%;
- Pemeliharaan kanal/saluran induk pengendali banjir sepanjang 7.225 meter dan terealisasi panjang 6.470 meter atau terealisasi 89,55%.

## *2. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai*

Kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai mempunyai tujuan mengamankan pantai dari daya rusak air yaitu erosi dan abrasi dengan membangun bangunan pemecah ombak (*breakwater dan groin*) dengan target panjang 80 meter dan terealisasi 82,8 meter atau terealisasi 103,5 %. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.687.400.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 1.687.400.000,- (100%).

## *3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai*

Kegiatan normalisasi/pemeliharaan saluran sungai bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai dan membentuk profil sungai dengan normalisasi/rehabilitasi sungai menggunakan alat berat (*exavator*) dan pembangunan siring/bronjong pengaman tebing sungai. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.654.211.600,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 5.652.951.000,- (99,98%). Target kegiatan terealisasi, yaitu :

- Normalisasi sungai yang dipelihara dengan pembangunan siring/bronjong sebanyak 4 sungai dan terealisasi 4 sungai atau 100 % yaitu Sungai Tembaga, Sungai Bu'un, Sungai Arut di Desa Penyombaan dan Sungai Imbauan.
- Normalisasi sungai yang dioperasikan dan dipelihara dengan rehabilitasi sebanyak 20 sungai dan terealisasi sebanyak 16 sungai atau terealisasi 80 % yaitu Sungai Karang Mulya, Sungai Anak Sungai Pakit, Sungai Pakit, Sungai Hijau, Sungai Pulau, Sungai Nyirih, Sungai Sintuk, Sungai Kakap, Sungai Melawen, Sungai Karang Anyar, Sungai Bamban, Sungai Sentosa, Sungai di Desa Karang Sari, Sungai di Desa Arga Mulya, Sungai di Desa Pandu Sanjaya dan Sungai di Desa Sungai Tendang.



*Pengendalian Banjir Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai*



*Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai*



*Normalisasi Saluran Sungai*

**Sasaran 8 : Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang**

Sasaran	IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang kabupaten/kota	16,67%	16,67%	100

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang pada tahun 2018 diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang kabupaten/kota, diperoleh capaian kinerja sebesar 100% melalui pengadaan peta digital.

Pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut :

❖ Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Maksud dari program ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang umum dan rinci di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 803.242.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 783.230.840,- (97,51%). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu :

1. *Survey dan Pemetaan*

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengadakan peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RDTR di tahun berikutnya. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 545.649.800,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 544.688.350,- (99,82%). Pada akhir tahun 2018 terealisasi 1 buah peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) kawasan perkotaan Pangkalan Bun Kecamatan Arut Selatan dari target 1 buah yang direncanakan dalam rangka pemenuhan ketersediaan peta tata ruang, atau terealisasi 100%.

2. *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang*

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder kewilayahan dan tata ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di 6 (enam) kecamatan. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 110.125.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 94.312.300,- (85,64%). Sampai akhir tahun 2018 kegiatan telah terlaksana 100%.

### 3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan pemanfaatan ruang dengan cara menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai penataan ruang di Kabupaten Kotawaringin Barat. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 147.467.200,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 144.230.190,- (97,80%). Sampai akhir tahun 2018 telah terlaksana 1 (satu) kali Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penataan Ruang, permohonan informasi tata ruang sebanyak 16 surat, permohonan pengurusan siteplan sebanyak 35 surat, permohonan pengurusan IMB sebanyak 97 surat, berdasarkan dari surat permohonan yang masuk terhadap tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang adalah 100%.



*Survey dan Pemetaan*



*Monitoring, Evaluasi dan Kegiatan Pelaporan Rencana Tata Ruang*

## III.2. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kobar TA. 2018**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	<b>Pendapatan</b>	<b>1.718.500.000,00</b>	<b>1.763.859.229,24</b>	<b>102,63</b>
	a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah	1.718.500.000,00	1.763.859.229,24	102,63
2.	<b>Belanja</b>	<b>246.841.363.000,00</b>	<b>243.279.535.948,12</b>	<b>98,55</b>
	a. Belanja tidak langsung	8.168.513.000,00	7.707.838.560,00	94,36
	b. Belanja langsung	238.672.850.000,00	235.571.697.388,12	98,70
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(245.122.863.000,00)</b>	<b>(241.515.676.718,88)</b>	<b>98,52</b>

Sumber : Laporan Keuangan Dinas PUPR TA.2018

Berdasarkan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor900/04/II/DPPA-SKPD/2018 tanggal 18 Oktober 2018 bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat menganggarkan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.718.500.000,00 dan anggaran belanja (langsung dan tidak langsung) sebesar Rp. 246.841.363.000,00 dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.168.513.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.238.672.850.000,00. Sampai akhir Desember 2018 anggaran belanja telah terealisasi (belanja langsung dan tidak langsung) sebesar Rp. 243.279.535.948,12 atau sebesar 98,55%. Dibandingkan dengan tahun 2017, maka persentase realisasi anggaran belanja mengalami penurunan dari 98,94% pada tahun 2017 menjadi 98,55% pada tahun 2018. Salah satu faktor penyebab penurunan realisasi anggaran yaitu ditahun 2018 karena adanya setoran pengembalian belanja langsung ke kas daerah berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan di tahun 2018.

Apabila dilihat dari realisasi antara pendapatan dan belanja daerah terdapat perbedaan yang cukup besar, dimana realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 243.279.535.948,12 dan pendapatan hanya Rp. 1.763.859.229,24 sehingga terjadi defisit anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. (241.515.676.718,88) atau 98,52%.

Sedangkan untuk perincian realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4. : Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Langsung TA.2018**

No.	Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Langsung 2018	Diterima (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
<b>I.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
1.	Belanja pegawai	8.168.513.000,00	7.707.838.560,00	(460.674.440,00)	94,36
<b>II.</b>	<b>Belanja Langsung</b>				
2.	Belanja pegawai	4.680.295.200,00	4.586.572.166,05	(93.723.033,94)	97,99
3.	Belanja barang dan jasa	34.978.589.572,00	33.988.158.417,82	(990.431.154,18)	97,16
4.	Belanja modal	199.013.965.228,00	196.996.966.804,25	(2.016.998.423,75)	98,98
	<b>Jumlah</b>	<b>246.841.363.000,00</b>	<b>243.279.535.948,12</b>	<b>(3.561.827.051,88)</b>	<b>98,55</b>

Sumber : Laporan Keuangan Dinas PUPR TA.2018

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2018 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*. Dalam implementasi perspektif yang lebih luas, maka LKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh stakeholder.

Berdasarkan hasil penghitungan capaian kinerja sasaran dari 11 indikator kinerja untuk mencapai 8 sasaran diperoleh rata-rata capaian sasaran pada tahun 2018 sebesar 150,78% (sangat berhasil) dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 235.571.697.388,12 atau 98,70% sedangkan realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 adalah 99,87%. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 terdapat beberapa hambatan, yaitu:

- a. Pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan pekerjaan sudah sesuai dengan time schedule yang ditetapkan dalam surat perjanjian, namun dalam proses kelengkapan administrasi yang merupakan salah satu syarat dalam proses pencairan (penyerapan anggaran) tidak dapat dilaksanakan dengan cepat, sehingga proses penyerapan anggaran tidak sesuai dengan harapan.
- b. Dalam penyelesaian pekerjaan oleh pihak pelaksana sering kali ditemukan beberapa kegiatan secara kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan oleh tim pemeriksa pekerjaan.
- c. Terdapat beberapa pelaksana kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan juga terdapat pekerjaan yang secara volume tidak mencukupi sesuai ketentuan.
- d. Belum kuatnya sinergi antara pemanfaatan infrastruktur irigasi, kelompok tani dan pengelolaan lahan pertanian sehingga belum optimalisasi outcome irigasi;
- e. tingginya erosi dan abrasi pantai serta perlunya penanganan yang terintegrasi dan mencakup wilayah yang luas.
- f. Belum fokusnya target penanganan pembangunan insfrastruktur bidang sumber daya air.
- g. Masih kurangnya tenaga yang memiliki keahlian pemetaan.
- h. Masih terbatasnya sarana (alat bantu) kerja dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- i. Masih belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang daerah.
- j. Terbatasnya dana pemerintah khususnya dana APBD Kabupaten bila dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur yang harus dibangun sehingga kegiatan pembangunan belum dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dan kendala tersebut diatas adalah :

- a. Melakukan teguran secara lisan dan tertulis agar pihak pelaksana segera mencukupi administrasi untuk mempercepat proses pencairan anggaran.
- b. Mengawasi lebih teliti terutama dalam masa pelaksanaan pekerjaan terkait dengan kualitas dan kuantitas. Menegur apabila pihak pelaksana masih melakukan kelalaian dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Melakukan teguran secara lisan dan tertulis pada pelaksana kegiatan agar lebih memperhatikan jangka waktu pelaksanaan dengan menyesuaikan aktifitas di lapangan sesuai dengan *time schedule*.
- d. Mengoptimalkan sinergi antara pemanfaatan infrastruktur pengairan, kelompok tani dan pengelolaan lahan pertanian;
- e. Mengidentifikasi dan menginventarisir lokasi-lokasi yang tingkat abrasi dan erosinya cukup tinggi untuk dapat segera dilakukan upaya penanganan secara teknis sedangkan upaya preventifnya yaitu dengan melakukan koordinasi lintas sektor melalui upaya penanaman tanaman mangrove;
- f. Perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Kawasan Prioritas.
- g. Mengirimkan/mengikutsertakan staff Bidang Penataan Ruang guna mengikuti pendidikan dan pelatihan (kursus) dan/atau penambahan tenaga yang memiliki keahlian pemetaan
- h. Menambah dan mengadakan sarana (alat kerja) pendukung yang masih kurang dan saat ini dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan penataan ruang daerah.
- i. Menambah/meningkatkan intensitas penyebaran informasi mengenai penataan ruang daerah kepada seluruh lapisan masyarakat dengan membangun sistem informasi berbasis web
- j. Mengajukan usulan kegiatan melalui sumber dana APBD Propinsi maupun APBN.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 ini, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai masukan/arahan guna optimalisasi dan peningkatan atas hasil kinerja dalam pelaksanaan tugas sehingga penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan serta berkesinambungan.

Pangkalan Bun, 15 Februari 2019  
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**Dr. JUNI GULTOM, ST., MTP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680609 199503 1 003

# LAMPURAN

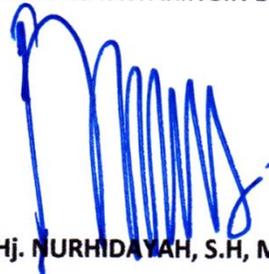


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	78,34	%
2	Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	83,10	%
3	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	79	%
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	90	%
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	77	%
4	Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan	76,90	%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangan	33	%
6	Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	19	%
7	Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan upaya pengamanan pantai	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	16	%
		Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai	45	%
8	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang kabupaten/kota	16,67	%

NO.	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	3.337.269.546,00	APBD
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	580.512.000,00	APBD
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	210.126.500,00	APBD
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp	228.000.000,00	APBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	4.380.000,00	APBD
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	130.392.952.750,00	APBD/APBN
7	Program Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	Rp	8.595.354.119,00	APBD
8	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	7.250.045.000,00	APBD
9	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rp	196.260.000,00	APBD
10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp	1.365.500.000,00	APBD
11	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp	14.953.280.600,00	APBD/APBN
12	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Rp	4.669.724.200,00	APBD
13	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Rp	12.467.438.481,00	APBD/APBN
14	Program pengendalian banjir	Rp	11.078.980.600,00	APBD
15	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Rp	11.551.427.000,00	APBD
16	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Rp	29.960.191.704,00	APBD
17	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Rp	803.242.000,00	APBD
18	Program Pembinaan Konstruksi	Rp	1.028.165.500,00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>238.672.850.000,00</b>	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. AGUS YUWONO, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19590814 198812 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp.( 0532 ) 21034 Fax. (0532) 22011  
PANGKALAN BUN 74112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR : 600/05.A /PUPR**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Kesatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;  
Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022;  
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada Tanggal Januari 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**Ir. AGUS YUWONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590814 198812 1 001



**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**Nomor : 600/ 05.A /PUPR**  
**Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULA HITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Panjang Jalan Memenuhi Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\sum^{eksisting} \text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	78,34%	Kabid. Bina Marga
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat – Pusat Kegiatan dan Pusat – Pusat Prod}}{\sum^{target\ keseluruhan} \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat – Pusat Kegiatan dan Pusat – Pusat Produksi}}$	83,10%	Kabid. Bina Marga
3.	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Masyarakat terlayani air minum}}{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Proyeksi total Masyarakat}} \times 100\%$	79%	Kabid. Cipta Karya
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	$\frac{\sum \text{Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK Komunal/SPAL Terpusat}}{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Jumlah total penduduk kabupaten}} \times 100\%$	90%	Kabid. Cipta Karya
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	$\frac{\sum \text{Jumlah Penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase}}{\sum \text{Jumlah penduduk seluruh kota}} \times 100\%$	77%	Kabid. Cipta Karya
4.	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di perkotaan	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kota A}}{\sum^{KotaA} \text{Total Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kota A}} \times 100\%$	76,90%	Kabid. Cipta Karya
5.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangan	$\frac{\sum \text{Ketersediaan Air Irigasi} \left( \frac{\text{liter}}{\text{detik}} \right) \text{ pada Setiap Musim Tanam}}{\sum \text{Kebutuhan Air Irigasi} \left( \frac{\text{liter}}{\text{detik}} \right) \text{ berdasarkan Rencana Tata Tanam}} \times 100\%$	33%	Kabid. Sumber Daya Air

1	2	3	4	5	6
6.	Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	$\frac{\sum \text{Ketersediaan Air Baku (m}^3/\text{tahun) dari Instalasi Pengolah Air}}{\sum \text{Kebutuhan Air Baku (m}^3/\text{tahun) berdasarkan Target MDGs}} \times 100\%$	19%	Kabid. Sumber Daya Air
7.	Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan upaya pengamanan pantai	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	$\frac{\text{Target Penanganan Banjir}}{\text{Total Daerah Banjir}} \times 100\%$	16%	Kabid. Sumber Daya Air
		Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai	$\frac{\text{Panjang Pantai yang Sudah Tertangani di Daerah Kritis}}{\text{Panjang Pantai Kritis}} \times 100\%$	45%	Kabid. Sumber Daya Air
8.	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang kabupaten/kota	$\frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah Peta Analog/Digital}}{\sum \text{Seluruhkab/Kota/Kec/Kelurahan Jumlah Peta Analog/Digital}} \times 100\%$	16,67%	Kabid. Penataan Ruang
<b>8 Sasaran</b>		<b>11 IKU</b>			

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada Tanggal Januari 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

  
**Ir. AGUS YUWONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590814 198812 1 001

**PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	PENJELASAN/FORMULA HITUNGAN	DATA PERHITUNGAN	HASIL
	2	3	4	5	6
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	78,34%	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Panjang Jalan Memenuhi Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\sum^{eksisting} \text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{609,21 + 350,967}{1222,845} \times 100\%$	78,52%
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	83,10%	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat – Pusat Kegiatan dan Pusat – Pusat Produksi}}{\sum^{target\ keseluruhan} \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat – Pusat Kegiatan dan Pusat – Pusat Produksi}} \times 100\%$	$\frac{1222,845}{1222,845} \times 100\%$	100%
3	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	79%	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Masyarakat terlayani air minum}}{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Proyeksi total Masyarakat}} \times 100\%$	$\frac{187.007}{277.048} \times 100\%$	67,5%
4	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	90%	$\frac{\sum \text{Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK Komunal/SPAL Terpusat}}{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Jumlah total penduduk kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{242.749}{277.048} \times 100\%$	87,6%
5	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	77%	$\frac{\sum \text{Jumlah Penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase}}{\sum \text{Jumlah penduduk seluruh kota}} \times 100\%$	$\frac{138.349}{165.688} \times 100\%$	83,5%

6	Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di perkotaan	76,90%	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kota A}}{\sum^{KotaA} \text{Total Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kota A}} \times 100\%$	$\frac{8,20}{260,00} \times 100\%$	61,8%
7	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian dan sistem irigasi sesuai dengan kewenangan	33%	$\frac{\sum \text{Ketersediaan Air Irigasi } \left(\frac{\text{liter}}{\text{detik}}\right) \text{ pada Setiap Musim Tanam}}{\sum \text{Kebutuhan Air Irigasi } \left(\frac{\text{liter}}{\text{detik}}\right) \text{ berdasarkan Rencana Tata Tanam}} \times 100\%$	$\frac{100,80 \left(\frac{\text{Lt}}{\text{dt}}\right)}{132,00 \left(\frac{\text{Lt}}{\text{dt}}\right)} \times 100\%$	76%
8	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	19%	$\frac{\sum \text{Ketersediaan Air Baku } \left(\frac{m^3}{\text{tahun}}\right) \text{ dari Instalasi Pengolah Air}}{\sum \text{Kebutuhan Air Baku } \left(\frac{m^3}{\text{tahun}}\right) \text{ berdasarkan Target MDGs}} \times 100\%$	$\frac{6.694.122 + 400.464 \text{ m}^3/\text{Thn}}{10.632.564 \text{ m}^3/\text{Thn}} \times 100\%$	68,73%
9	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	16%	$\frac{\text{Target Penanganan Banjir}}{\text{Total Daerah Banjir}} \times 100\%$	$\frac{13}{30} \times 100\%$	43,33%
10	Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai	45%	$\frac{\text{Panjang Pantai yang Sudah Tertangani di Daerah Kritis}}{\text{Panjang Pantai Kritis}} \times 100\%$	$\frac{155.520}{33.300} \times 100\%$	46,60%
11	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang kabupaten/kota	16,67%	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Jumlah Peta Analog/Digital}}{\sum^{Seluruhkab/Kota/Kec/Kelurahan} \text{Jumlah Peta Analog/Digital}} \times 100\%$	$\frac{1}{6} \times 100\%$	16,67%
<b>11 IKU</b>					